

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1. Teori Pengolahan/Penatalayanan (*Stewardship theory*)

Stewardship theory muncul bebarengan dengan perkembangan akuntansi. Teori *stewardship* berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, dimana *steward* termotivasi untuk berkelakuan sesuai keinginan *principal*. Teori *stewardship* adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 1989).

Pada teori *Stewardship* (penatalayanan) manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Stewardship theory* menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Jika terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *steward*, maka *steward* akan berusaha bekerjasama karena bertindak sesuai dengan tindakan *principal* dan demi kepentingan bersama dapat menjadi pertimbangan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama. Hal penting dalam *stewardship theory* adalah manajer menyalarkan tujuannya sesuai dengan tujuan *principal* namun tidak berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan (Raharjo, 2007).

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini yaitu *stewards* dalam hal ini adalah para pejabat pemerintahan desa yang diharapkan akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan *principal* yaitu masyarakat/*stakeholder* dan dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, merencanakan dan melaksanakan laporan yang diamanahkan, dengan demikian tujuan untuk mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik dapat tercapai secara maksimal. Teori ini digunakan karena teori ini memandang bahwa kepercayaan atas manajemen dapat terjadi jika manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang muncul, yaitu kepentingan publik pada umumnya dan kepentingan *shareholders* pada khususnya.

Hubungan *Stewardship Theory* dengan penelitian ini adalah untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* diharapkan mengerahkan semua kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusianya yang kompeten dalam melaksanakan tugas dengan baik. Menerapkan Etika Kepemimpinan pada seorang pemimpin untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan karena adanya sifat amanah dan setia seorang pimpinan pemerintahan terhadap komitmen yang baik dalam pemerintahannya. Penggunaan Sistem Pengendalian Internal dalam pengembangannya untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Serta memanfaatkan Teknologi Informasi yang ada dalam perwujudannya untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara

stewards dengan *principals*, sehingga dalam pengelolaan laporan keuangan diharapkan dapat mencapai kualitas yang semakin baik.

2.2.Tinjauan Pustaka

2.2.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban kepengelolaan atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas (Haza, 2015). Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan (Hardyansyah, 2016).

Undang undang Nomor 6 pasal 1 ayat 10 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Setiap laporan keuangan desa yang disajikan harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pemerintah desa wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Lisda et al., 2018).

Kualitas laporan keuangan (*financial statement*) adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan (Yanti, 2019). Kualitas pelaporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari lima karakteristik yang dipaparkan oleh Hanafi & Halim (2003) dan Yanti (2019), diantaranya : pertama bermanfaat untuk pengambilan keputusan, kedua relevan yaitu memiliki nilai prediksi, nilai umpan balik, dan tepat waktu, ketiga reliabel, laporan keuangan dapat dikatakan reliabel jika laporan keuangan dapat diversifikasi, netral, dan representatif, keempat laporan bisa diperbandingkan termasuk konsistensi, dan yang terakhir laporan memiliki manfaat lebih besar dibandingkan biaya dan material.

2.2.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah sesuatu yang dapat terukur, diprediksikan, dan dievaluasi yang merefleksikan perilaku kerja seseorang yang terdiri atas kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) (Atikah, 2020). Kompetensi merupakan faktor penentu bagi seseorang untuk menampilkan kinerja

terbaiknya serta faktor yang menentukan keberhasilan organisasi tersebut dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang akuntan pemerintah daerah khususnya pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut yaitu dengan mengacu kepada standar kompetensi lulusan akuntansi yang telah ditetapkan oleh IFAC (*International Federation Of Accountants*), yakni IES (*International Education Standards*), dalam hal ini IES 2, IES 3, IES 4 yang mencakup dimensi *knowledge, skills, attitude* (Riandani, 2017).

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting yang harus dilihat dalam instansi. Untuk meningkatkan SDM maka harus diadakan pembinaan (Gumelar, 2017). Pembinaan SDM bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang disiplin, profesional, berkualitas tinggi, produktif untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien. Penelitian Gumelar (2017) mendefinisikan Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan dalam organisasi.

2.2.3. Etika Kepemimpinan

Etika adalah sebuah cabang filsafat mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika dalam kepemimpinan dikaitkan dengan bagaimana cara pemimpin dapat memimpin dengan tetap mengikuti kaidah, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat. Di dalam hal ini,

etika akan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam suatu organisasi (Yanti, 2019).

Seorang pemimpin menjadikan etika sebagai dasar mengoptimalkan semua bakat dan potensi sumber daya manusia, dan meningkatkan nilai dari semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi serta menghargai semua kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Etika kepemimpinan dapat terwujud jika pemimpin memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya oleh para pengikutnya sehingga pengikutnya akan merasa aman didekatnya, juga memiliki hubungan yang positif, dapat menilai dan memahami kinerja para pengikutnya, serta dapat bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dibebankan dengan cara menyelesaikan tugas dengan baik, dan tak lupa memiliki sifat adil, kritis, rendah hati, dan hormat kepada diri sendiri dan orang lain (Putra & Gunadi, 2017).

2.2.4. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008). Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Atikah, 2020).

Tujuan sistem pengendalian intern berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien

Kegiatan pemerintah dikatakan efektif bila ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengendalian harus dirancang agar efektif untuk menjaga tercapainya tujuan. Sedangkan efisien dikaitkan dengan pemanfaatan asset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima), dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai standar (BPKP, 2009).

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat dan sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal/layak dipercaya, dalam arti menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

3. Pengamanan asset Negara

Asset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Upaya pengamanan asset ini antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pengendalian, seperti pembatasan akses penggunaan asset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan dan sebagainya.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang – undangan.

2.2.5. Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya meliputi perangkat keras dan perangkat lunak saja namun juga meliputi : komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Riandani, 2017).

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Widyaningrum (2010) dan Riandani (2017) mencakup adanya :

- 1) Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan
- 2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Jurnal & Supomo (2002) dan Riandani (2017) adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari:

- 1) Bagian ekonomi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
- 2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja.

- 3) Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
- 4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
- 5) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 6) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi.
- 7) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
- 8) Peralatan yang usang/rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah, dapat mempercepat proses pengolahan data transaksi, keakurasian dalam perhitungan, serta menghasilkan *output* lainnya lebih bisa tepat waktu (Arfianti, 2011). Suatu organisasi perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi canggih untuk sistem informasi manajemen jaringan bangunan dan proses kerja yang memungkinkan *government* untuk bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit. Karena penggunaan teknologi informasi yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas (Rifandi, 2018).

2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Judul & Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Atikah. (2020).	X1 : Sistem Keuangan Desa X2 : Kompetensi SDM X3 : Sistem Pengendalian Intern Y : Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Sistem Keuangan Desa (X1) menunjukkan pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) menunjukkan pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. Sistem pengendalian intern (X3) menunjukkan pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
2.	Basudewa <i>et al</i> (2019).	X1 : Gaya Kepemimpinan	1. Gaya kepemimpinan (X1) memiliki pengaruh yang

No.	Judul & Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
		X2: Pemanfaatan Teknologi Informasi Y : Kualitas Laporan Keuangan Desa	positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. 2. Pemanfaatan teknologi informasi (X2) memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.
3.	Yanti (2019).	X1 : Etika Kepemimpinan X2: Tingkat Pemahaman Akuntansi Y : Kualitas Pelaporan Keuangan	1. Etika kepemimpinan (X1) berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan 2. Tingkat pemahaman (X2) akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan

No.	Judul & Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
4.	Suari (2019).	X1 : Etika Kepemimpinan X2 : Kualitas Sistem Informasi Akuntansi X3 : Fungsi Badan Pengawas Y : Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Etika kepemimpinan (X1) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan 2. Kualitas sistem informasi akuntansi (X2) menunjukkan pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. Fungsi badan pengawas (X3) menunjukkan pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
5.	Lisda <i>et al</i> (2018).	X1 : Penerapan Sistem Informasi	1. Penerapan Sistem Informasi Daerah (SIMDA) Desa (X1)

No.	Judul & Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
		Daerah (SIMDA) Desa X2 : Kompetensi SDM X3 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan 2. Kompetensi SDM (X2) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
6.	Ramadhani (2018).	X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia	1. Kompetensi SDM (X1) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

No.	Judul & Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
		<p>X2 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>X3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>X4 : Sistem Pengendalian Internal</p> <p>X5 : Kompetensi Staf</p>	<p>2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X2) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>4. Sistem pengendalian intern (X4) mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>5. Kompetensi staf (X5) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap</p>

No.	Judul & Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
		Y : Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	kualitas laporan keuangan.
7.	Riandani (2017)	X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 : Pengendalian Intern Pemerintah	1. Kompetensi SDM (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Pemanfaatan teknologi informasi (X2) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 3. Sistem pengendalian intern (X3) mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

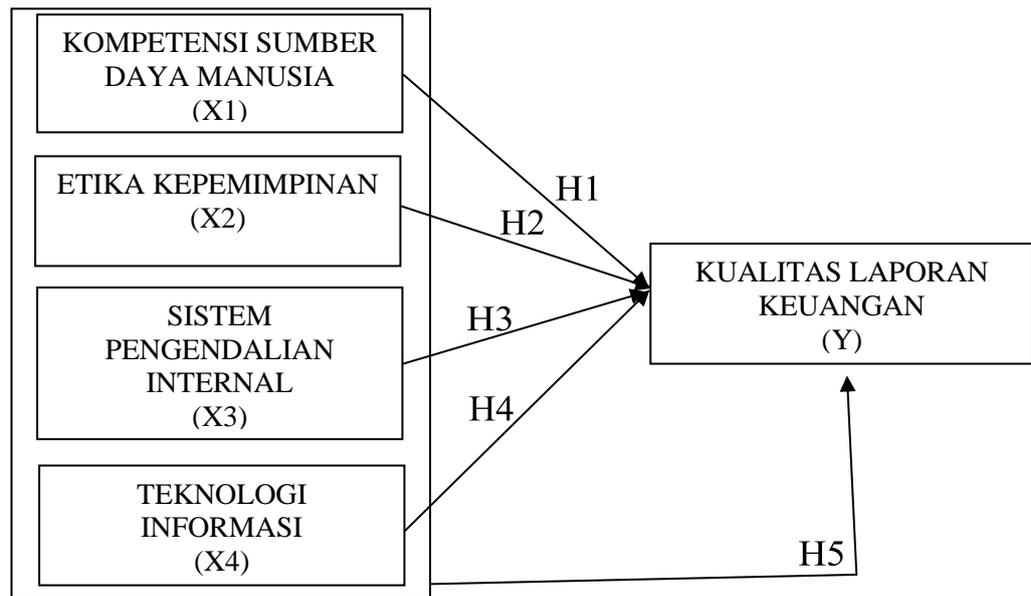
No.	Judul & Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
		Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
8.	Nadir & Hasyim. (2017)	X1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia Y : Kualitas Laporan Keuangan	1. Pemanfaatan teknologi informasi (X1) berpengaruh positif secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 2. Kompetensi sumber daya (X2) manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

No.	Judul & Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
		Pemerintah Daerah	

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Etika Kepemimpinan, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sedangkan variabel dependennya adalah Kualitas Laporan Keuangan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



2.5. Perumusan Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (keterandalan) dipengaruhi oleh dua elemen yaitu kualitas informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkannya (Wahyono, 2014). Selain itu, dengan adanya kompetensi staf akuntansi yang memadai memungkinkan terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas karena disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (Hartono & Ramdany, 2020).

Berkaitan dengan teori *stewardship*, bahwa *steward* berorientasi pada pelayanan, dalam hal ini dapat diartikan *steward* mementingkan urusan perusahaan daripada urusan masing masing individu, maka manajemen pemerintah desa akan terdorong untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya, khususnya sumber daya pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan.

Penelitian Gumelar (2017), Riadani (2017), Lisda et al. (2018), Ramadhani (2018) dan Atikah (2020) menyatakan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kompetensi Sumber Daya manusia berpengaruh positif terhadap prediksi kualitas laporan keuangan.

2.5.2. Pengaruh Etika Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam perusahaan, etika kepemimpinan berperan penting terhadap kualitas pelaporan keuangan, karena saat etika kepemimpinan dapat diterapkan dalam sebuah organisasi, maka orang yang didalamnya akan termotivasi dalam bekerja sehingga akan melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai, begitu pula dengan kualitas pelaporan keuangan yang akan dihasilkan karena dilaksanakan dengan jujur dan sesuai norma dan aturan yang mengatur didalamnya (Yanti, 2019). Etika Kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin untuk membimbing, memandu, dan mengarahkan sejumlah orang atau bawahannya untuk mencapai tujuan yang sama (Basudewa & Putri, 2019).

Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan kegagalan yang terdapat pada suatu perusahaan diakibatkan oleh karyawan yang mencatat transaksi – transaksi pada jurnal sesuai permintaan atasannya. Jadi ketika atasan mereka meminta para karyawan tersebut untuk memanipulasi laporan keuangan, maka karyawan yang merupakan bawahan akan cenderung untuk mengikuti perintah atasan, walaupun hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan norma dan etika yang ada di masyarakat.

Berkaitan dengan teori *stewardship*, bahwa *steward* berorientasi pada pelayanan, yang berarti *steward* akan bekerja dengan sebaik baiknya untuk kepentingan *principal* dan dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pada teori *stewardship* dijelaskan bahwa bentuk pola kepemimpinan dan hubungan para atasan dengan bawahannya dalam sebuah organisasi menggunakan mekanisme situasional. Mekanisme ini meliputi filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi, serta kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa mengorbankan kepentingan masing-masing. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi.

Penelitian Putra (2013), Rifa'I (2014), Herniyasa (2015), (Yanti (2019) dan Basudewa & Putri (2019) mengindikasikan bahwa etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Etika Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap prediksi kualitas laporan keuangan.

2.5.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang akan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki nilai (Gumelar, 2017). Sistem pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* (Chodijah & Hidayah, 2018).

Berkaitan dengan teori *stewardship*, bahwa *steward* berorientasi pada pelayanan, yang artinya kepercayaan atas manajemen (*stewards*) dapat terjadi jika manajemen (*stewards*) bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang muncul. Maka pemerintah desa akan membangun sistem yang berkualitas guna mewujudkan penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Agar tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dengan baik tercapai.

Penelitian Indriastuti (2017), Riandani (2017), Lisda et al. (2018), Rahima et al (2018), dan Atikah (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap prediksi kualitas laporan keuangan.

2.5.4. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Diketahui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Suatu entitas akuntansi seperti pemerintah daerah, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi pasti akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Chodijah & Hidayah, 2018).

Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah, dapat mempercepat proses pengolahan data transaksi, keakurasian dalam perhitungan, serta menghasilkan *output* lainnya (Rifandi, 2018). Temuan ini juga didukung oleh penelitian Winidyaningrum (2010), Indriasari (2010) dan Indrawati (2013) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data memiliki keunggulan dalam kecepatan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, serta kecepatan dalam pemrosesan informasi.

Berkaitan dengan teori *stewardship*, bahwa *steward* berorientasi pada pelayanan, manajemen (*steward*) tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, Oleh karena itu, pemerintah desa akan memanfaatkan adanya teknologi informasi sebaik mungkin untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas guna memberikan informasi pada *stakeholders*. Karena pemanfaatan teknologi informasi meliputi teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan

meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan serta penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih tepat waktu.

Penelitian Haza (2015), Andrianto (2017), Nadir & Hasyim (2017), Rifandi (2018) dan Basudewa & Putri (2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap prediksi kualitas laporan keuangan.

2.5.5. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Etika Kepemimpinan, Sistem Pengendalian Internal dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah desa selaku *stewards* harus memiliki kompetensi sumber daya manusia, etika kepemimpinan, sistem pengendalian internal dan teknologi informasi guna menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dengan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, etika kepemimpinan, sistem pengendalian internal dan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.